

DIALEKTIKA PUBLIK
JURNAL ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM

Vol. 6 No. 2 (2022)

ISSN (Print) 2528-3332
ISSN (Online) 2621-2218

Efektifitas Program Pelatihan Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Pemula Di Kota Tanjungpinang - *Billy Jenawi, Diah Siti Utari, Sarvika Destia*

Analisis fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang - *Rasti Nanda Sari, Asih Widi Lestar, Dody Setyawan*

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam - *Maria Natalia Lerabeni*

Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu - *Asih Widi Lestari, Fransiska Novian, Noora Fithriana*

Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep Blue Economy Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang – *Helmi Pratama Firmasnyah, Sri Rahayu*

DAFTAR ISI

	HAL
Efektifitas Program Pelatihan Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Pemula Di Kota Tanjungpinang - <i>Billy Jenawi, Diah Siti Utari, Sarvika Destia</i>	1-8
Analisis fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang - <i>Rasti Nanda Sari, Asih Widi Lestar, Dody Setyawan</i>	9-12
Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam - <i>Maria Natalia Lerabeni</i>	13-20
Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu - <i>Asih Widi Lestari, Fransiska Novian, Noora Fithriana</i>	21-24
Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep Blue Economy Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang – <i>Helmi Pratama Firmansyah, Sri Rahayu</i>	25-31

Efektifitas Program Pelatihan Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Pemula Di Kota Tanjungpinang

Billy Jenawi¹, Diah Siti Utari², Sarvika Destia³

1Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, 2Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, 3Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KATA KUNCI

Effectiveness, Training, Entrepreneurship

KORESPONDENSI

E-mail: billyjenawi08@gmail.com

A B S T R A C T

The training was a proposal from Tanjungpinang City based on the potential and conditions in each kelurahan and selected based on the results of the musrenbang. In 2019 entrepreneurship training was held for novice workers, a proposal from the Kp. Bugis. This study aimed to determine the effectiveness of entrepreneurship training for novice workers carried out by the Department of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises, Tanjungpinang City. The type of research used is descriptive with mixed methods using quantitative and qualitative data. The strategy used is a concurrent embedded, so one method is more dominant than the other methods. In this study, quantitative methods are more prevalent than qualitative methods. The population in this study is all parties whose characteristics can be observed to be drawn as a sample. The model in the quantitative method is the entrepreneurship training participants, as many as 19 people who were selected using saturated sampling, and the example in the qualitative form or informants are the Head of Placement and Training at the Manpower Office 1 person, one person entrepreneurship training instructor, one person from the Bugis Village Village, and five trainees. Based on the results of quantitative data research, the effectiveness of entrepreneurship training programs for the workforce of Cooperatives and Micro Enterprises in Tanjungpinang City has been very effective. However, the qualitative data still found obstacles such as the delivery of training information was not widely spread by the Bugis village community, interviews had not been carried out strictly, and there were still participants who had not applied the knowledge gained from the training. Therefore, it is suggested to the stakeholders, namely the workforce office and the kelurahan to work together in disseminating and selecting participants so that they are chosen fairly. As well as for the community is expected to maximize the knowledge gained from entrepreneurship training.

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berkeadilan

sesuai amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah menyelenggarakan program pelatihan tenaga kerja. Hal itu didasarkan pada Peraturan Walikota

Tanjungpinang No. 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dimana tugas pokoknya ialah melaksanakan urusan pemerintah daerah pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, penempatan dan pelatihan tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro.

Dari hasil penelitian Risma Dewi Lestari (2018), dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tindak lanjut setelah pelatihan seperti pembinaan ataupun pengontrolan dari pihak dinas, hal tersebut dikatakan oleh salah satu peserta yang mengikuti pelatihan tenaga kerja dibidang pembuatan jilbab. Tidak adanya tindak lanjut tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang ada. Yang mana pentingnya tindak lanjut setelah pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk mengontrol perkembangan para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan untuk melihat sejauh mana tujuan program pelatihan tersebut sudah tercapai.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan data yang telah didapatkan dengan diadakannya pelatihan tenaga kerja khususnya pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang diharapkan peserta yang mengikuti dapat memiliki keterampilan dan nilai lebih untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun perekonomiannya dengan berwirausaha secara mandiri sesuai dengan potensi daerah.

Namun jika pelaksanaan pelatihan tenaga kerja tersebut dilakukan dengan waktu yang singkat tujuan yang ingin dicapai mungkin akan sulit tercapai. Jika tidak adanya tindak lanjut dari pihak dinas setelah pelatihan, seperti pendampingan usaha ataupun pengontrolan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan, ini akan sulit untuk mengetahui apakah tujuan dari diadakannya pelatihan telah tercapai atau belum.

Dengan dasar latar belakang dari fenomena masalah yang ada, maka dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pelatihan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Pemula di Kota Tanjungpinang”.

2. METODOLOGI

Program

Chen (1990:72) mengemukakan teori program merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pengaruh penting yang diantisipasi, dan bagaimana tujuan dan pengaruh tersebut akan dihasilkan. Berdasarkan pandangan tersebut maka disimpulkan bahwa program merupakan suatu rencana kegiatan yang disusun dan direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya dalam program tersebut akan tergambar bagaimana rencana yang sudah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan.

Efektivitas

Efektifitas adalah elemen utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran yang ditentukan sudah tercapai. Menurut Sumaryadi (2005:105) pada dasarnya “efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan organisasi”.

Ukuran Efektivitas

Menurut Etziono (Waluyo 2010:84), pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi disebut “sistem model” yang meliputi empat kriteria sebagai berikut:

Kriteria adaptasi: dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Kriteria integrasi: yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk menjadikan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan beberapa macam organisasi lainnya.

Kriteria motivasi anggota: dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan hubungan antar perilaku organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kriteria produksi: yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu kelompok.

Pelatihan

Konsep pelatihan dalam penulisan ini adalah pelatihan kerja yang ditujukan untuk tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Kewirausahaan

Hawkins dan Pater (Kamil, 2012:122) mengatakan kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang menuntut pelakunya memiliki ciri-ciri tertentu dalam menjalankan usahanya.

Ciri ciri wirausaha adalah sebagai berikut:

Kepribadian, dapat diamati dari segi kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian mengambil resiko, serta memiliki motivasi dan kemauan yang kuat.

Kemampuan hubungan, operasionalnya dapat dilihat dari kemampuan komunikasi dan hubungan antar personal, kepemimpinan, dan manajemen.

Pemasaran, mencakup kemampuan untuk menentukan produk, harga, periklanan dan promosi.

Keahlian manajemen, dilihat dari keahlian penetapan tujuan, perencanaan dan pengaturan pribadi.

Keuangan, meliputi sikap terhadap uang dan cara manajemen uang.

Metode Penelitian Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan campuran yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan memperluas dan memperdalam pemahaman dari fakta-fakta yang didapat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, tepatnya di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang merupakan implementor yang bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula ini. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasinya adalah seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang berjumlah 40 orang dan peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula yang merupakan masyarakat Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota yang berjumlah 20 orang dan 4 narasumber/instruktur dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yaitu pemilik toko Citra Sari Snack & Catering dan pengelola Rumah Kreasi Gonggong, serta pegawaikantor kelurahan Kp. Bugis.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

Kuisisioner

Kuisisioner responden mempunyai peranan penting dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Penyampaian daftar pernyataan atau kuisisioner dari peneliti kepada responden yakni peserta pelatihan kewirausahaan yaitu sebanyak 19 orang.

Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber (informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang diteliti yaitu mengenai efektivitas program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di kota Tanjungpinang.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data Kuantitatif

Data yang telah didapat, kemudian dihitung tanggapan responden terhadap masing-masing

indikator dalam penelitian ini dengan indeks yang dapat dipakai untuk menggolongkan tingkat tanggapan responden terhadap indikator penelitian. Maka untuk menghitung indeks tanggapan responden terlebih dahulu dihitung interval dengan rumus berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pertanyaan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pertanyaan

Teknik Data Kualitatif

Menggunakan metode campuran dengan strategi embedded konkuren. Strategi embedded konkuren yaitu penelitian yang menanamkan satu metode pada metode yang lain, dan pengumpulan data dilakukan secara bersamaan, sehingga terdapat metode yang lebih dominan dari metode lainnya. Pada penelitian ini metode yang lebih dominan digunakan ialah metode kuantitatif, dan metode kualitatif sebagai data pendukung untuk mengembangkan atau mengklarifikasi data kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Program

Untuk melihat pemahaman program dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang dengan melalui kuesioner yang telah disebarakan dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap dimensi pemahaman program dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula. Untuk mempermudah perhitungan maka hitungan interval dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{(5 \times 5) - 5}{5} = 4$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pernyataan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pernyataan

Maka dari rumus diatas diperoleh interval untuk dimensi pemahaman program yaitu 4. Sehingga

untuk menghitung hasil tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Pemahaman Program

No	Interval	Kategori Tanggapan	Jumlah	(%)
1	21 – 25	Sangat Setuju	15	78,9
2	17 – 20	Setuju	4	21,1
3	13 – 16	Kurang Setuju	0	0
4	9 – 12	Tidak Setuju	0	0
5	5 – 8	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total			19	100

Sumber: Olahan Data Penelitian

Maka dapat dikatakan bahwa dalam dimensi pemahaman program terhadap pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah sangat paham. Hal ini dilihat dari responden atau peserta pelatihan sudah sangat paham akan tujuan dari pelaksanaan program pelatihan tersebut dan hal tersebut juga dipengaruhi adanya sosialisasi dan pembekalan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebelum pelaksanaan pelatihan.

Tepat Sasaran

Untuk melihat tepat sasaran program dapat dilihat dari segi tepatnya peserta, pelatih serta materi pelatihan yang diselenggarakan. Sehingga dengan tepatnya sasaran, program pelatihan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan efektif.

Dalam tepat sasaran pada program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula melalui kuesioner yang telah disebarakan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap dimensi tepat sasaran dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang. Berikut merupakan hitungan interval dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{(11 \times 5) - 11}{5} = 8,8$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pernyataan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pernyataan

Maka dari rumus diatas diperoleh interval untuk dimensi tepat sasaran yaitu 8,8 dan dibulatkan menjadi 9. Sehingga untuk menghitung hasil tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Tepat Sasaran

No	Interval	Kategori Tanggapan	Jumlah	(%)
1	47 – 55	Sangat Setuju	11	57,9
2	38 – 46	Setuju	8	42,1
3	29 – 37	Kurang Setuju	0	0
4	20 – 28	Tidak Setuju	0	0
5	11 – 19	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total			19	100

Sumber: Olahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden

19 orang, dan dengan menggunakan skala modus didapatkan tanggapan terbanyak yaitu 11 orang (57,9%) sehingga tanggapan responden pada dimensi tepat sasaran yang ditinjau dari beberapa indikator yang telah diuraikan peneliti menunjuk pada sangat setuju yang berarti bahwa ketepatan sasaran dalam program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang sudah sangat tepat.

Maka dapat dikatakan bahwa pada dimensi tepat sasaran terhadap pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah sangat tepat. Hal ini dilihat dari ketepatan peserta yang mengikuti pelatihan, ketepatan narasumber atau instruktur pelatihan, ketepatan pelatihan yang dilaksanakan terhadap pasar kerja, ketepatan materi pelatihan serta ketepatan proses pelatihan. Walaupun sudah sangat tepat namun tetap terdapat kekurangan seperti pada proses seleksi yang kurang maksimal, dan lokasi pelatihan yang jauh dari tempat tinggal peserta.

Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya program dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Dalam tepat waktu pada program pelatihan kewirausahaan

bagi tenaga kerja pemula di kota tanjungpinang melalui kuesioner yang telah disebarakan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap dimensi tepat waktu dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang. koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang. Berikut merupakan hitungan interval dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{(3 \times 5) - 3}{5} = 2,4$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pernyataan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pernyataan

Maka dari rumus diatas diperoleh interval untuk dimensi tepat waktu yaitu 2,4. Sehingga untuk menghitung hasil tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

No	Interval	Kategori Tanggapan	Jumlah	(%)
1	12,6–15	Sangat Setuju	1	57,9
2	10,2–12,5	Setuju	8	42,1
3	7,8–10,1	Kurang Setuju	0	0
4	5,4–7,7	Tidak Setuju	0	10
5	3–5,3	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total			19	100

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Tepat Waktu

hitung interval dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{(4 \times 5) - 4}{5} = 3,2$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pernyataan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pernyataan

Maka dari rumus di atas diperoleh interval untuk dimensi tercapainya tujuan yaitu 3,2. Sehingga untuk menghitung hasil tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Sumber: Olahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah

Tabel 4

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Tercapainya Tujuan

responden 19 orang dengan menggunakan skala modus didapatkan tanggapan terbanyak yaitu 12 orang (63,1%) sehingga tanggapan responden pada dimensi tepat waktu yang ditinjau dari beberapa indikator yang telah diuraikan peneliti menunjuk pada tanggapan setuju yang berarti bahwa ketepatan

No	Interval	Kategori Tanggapan	Jumlah	(%)
1	16,8–20	Sangat Setuju	1	57,9
2	13,6–16,7	Setuju	8	42,1
3	10,4–13,5	Kurang Setuju	0	0
4	7,2–10,3	Tidak Setuju	0	10
5	4–7,1	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total			19	100

Sumber: Olahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden waktu dalam program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah tepat.

Maka dapat dikatakan bahwa pada dimensi tepat waktu terhadap pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah tepat. Hal ini dilihat dari waktu pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan jadwal atau perencanaan, dan waktu yang diberikan sudah cukup meningkatkan keterampilan peserta dalam bidang kewirausahaan.

Tercapainya Tujuan

Dalam tercapainya tujuan program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang melalui kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap dimensi tercapainya tujuan dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang. Berikut merupakan

19 orang serta menggunakan skala modus didapatkan tanggapan terbanyak yaitu 11 orang (57,9%) sehingga tanggapan responden pada dimensi tercapainya tujuan yang ditinjau dari beberapa indikator yang telah diuraikan peneliti menunjuk pada tanggapan sangat setuju yang

berarti bahwa tercapainya tujuan dalam program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang sudah sangat tercapai.

Maka dapat dikatakan bahwa pada dimensi tercapainya tujuan dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah sangat tercapai. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan, tumbuhnya jiwa kewirausahaan peserta setelah mengikuti pelatihan, dan peserta merasakan pelatihan ini sangat berguna untuk dirinya.

Perubahan nyata

Perubahan nyata dapat dilihat dari sejauh mana program pelatihan dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi sasaran program. Dalam perubahan nyata program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang melalui kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap dimensi perubahan nyata dari program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang. Berikut merupakan hitungan interval dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{(3 \times 5) - 3}{5} = 2,4$$

Skor Tertinggi = Jumlah Pernyataan x Jumlah Kategori
 Skor Terendah = Jumlah Pernyataan

Maka dari rumus diatas diperoleh interval untuk dimensi perubahan nyata yaitu 2,4. Sehingga untuk menghitung hasil tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Perubahan Nyata

No	Interval	Kategori Tanggapan	Jumlah	(%)
1	12,6–15	Sangat Setuju	8	57,9
2	10,2–12,5	Setuju	6	42,1
3	7,8–10,1	Kurang Setuju	4	0
4	5,4–7,7	Tidak Setuju	1	10

5	3-5,3	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	19	100		

Sumber: Olahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden 19 orang dengan menggunakan skala modus didapatkan tanggapan terbanyak yaitu 8 orang (57,9%) sehingga tanggapan responden pada dimensi perubahan nyata yang ditinjau dari beberapa indikator yang telah diuraikan peneliti menunjuk pada sangat setuju yang berarti bahwa perubahan nyata dalam program pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula di Kota Tanjungpinang sudah sangat berubah.

Maka dapat dikatakan bahwa pada dimensi perubahan nyata terhadap pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja pemula sudah sangat berubah. Hal ini dilihat dari tanggapan responden yang banyak menyatakan sangat setuju akan memiliki rencana membuka usaha, sangat setuju bahwa produktivitas mereka meningkat dan sangat setuju pendapatan mereka meningkat setelah mengikuti pelatihan. Namun terdapat juga peserta yang tidak mengalami perubahan, hal itu dilihat dari adanya tanggapan responden kurang setuju dan tidak setuju pada dimensi perubahan nyata.

4. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data kuantitatif, dalam menilai Efektivitas Program Pelatihan Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Pemula di Kota Tanjungpinang menggunakan konsep operasional penelitian yang dilihat dari lima dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata hasilnya adalah sangat efektif. Hal tersebut dipengaruhi adanya sosialisasi atau pembekalan yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebelum pelaksanaan pelatihan, peserta yang telah sesuai dengan karakteristik sasaran, konteks pelatihan yang diselenggarakan juga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta

narasumber, materi, fasilitas dan sarana juga dinilai sudah baik oleh responden. Jadwal pelaksanaan dan lama pelatihan yang diberikan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan. Peserta pelatihan merasa jiwa kewirausahaan mereka meningkat dan memiliki rencana untuk membuka suatu usaha, dan diantaranya merasakan adanya peningkatan pendapatan serta meningkatnya produktivitas setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Berdasarkan data kualitatif masih terdapat kendala seperti informasi adanya pelatihan belum tersebar secara luas oleh masyarakat Kelurahan Kampung Bugis karena disampaikan hanya melalui lisan, terdapat pengakuan peserta yang merasa tidak diseleksi saat mendaftar, lokasi pelaksanaan pelatihan yang jauh dari lokasi tempat tinggal peserta, dan terdapat peserta yang memiliki kendala keuangan sehingga belum dapat membangun usaha, serta tidak adanya pemantauan yang dilakukan pihak dinas maupun pihak kelurahan setelah pelatihan.

Saran

Diharapkan kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan pihak kelurahan lebih dioptimalkan lagi. Sehingga mengenai masalah penyampaian informasi pelatihan kepada masyarakat bisa lebih tersampaikan secara luas dan pemilihan peserta bisa lebih adil melalui seleksi yang ketat.

Diharapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang untuk memberikan pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya yang sejenis agar pelatihan dilaksanakan secara berkepanjangan seperti adanya bimbingan dan pemantauan setelah pelatihan. Sehingga pelatihan yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan peserta bisa menerapkan ilmu yang didapat dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Kepada Aparatur Pemerintah terutama pemerintah daerah selaku penguasa APBD yang digunakan untuk penyelenggaraan program

pelatihan kerja diharapkan dapat mempertimbangkan anggaran agar dapat memberikan modal ataupun alat untuk peserta pelatihan. Sehingga peserta dapat melanjutkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh tanpa hambatan modal. Diharapkan masyarakat yang mengikuti pelatihan dapat memahami pentingnya penyelenggaraan pelatihan ini agar masyarakat yang mengikuti bisa menerapkan ilmu yang didapat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Sunarya, Sudaryono, Asep Saefullah. (2011). Kewirausahaan. Yogyakarta: CV Andi.
- Anggara, S. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayat Teri Yanti. 2017. Analisis Program Pelatihan Kerja (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang). Jurnal: FISIP UMRAH Tanjungpinang.
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Vol. 2 Nomor 1.
- Hamalik, Oemar. 2007. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malaya. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Askara.
- Kamil, M. 2012. Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi). Bandung: Alfabeta.
- Khakim, Abdul. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi 1. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, D. Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Y. A. B. 2019. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya.
- Pasolong, H. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Risma Dewi Lestari. 2018. Evaluasi Pelaksanaan

Analisis fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Rasti Nanda Sari¹ Asih Widi Lestari² Dody Setyawan³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KEYWORDS

Participation, community, Village
Development Planning

KORESPONDENSI

No HP: 0823-0010-6243

E-mail: lestariwidi263@gmail.com

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it is hoped that all interests and village development can be better managed. Village residents and government have full authority and village managers plus assets and potential and are responsible for the activities carried out in village government development. In this type of qualitative research, with primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are observation, interviews, and documentation, sampling technique using purposive sampling, systematically data obtained from interviews and documentation by describing into units, choosing which one will be studied and make conclusions, as well as data validity techniques with triangulation techniques. The study results prove that from the planning aspect, the village government is increasing community participation in village development, and the function of the bundle's program, which can be called, is still lacking. From the aspect of accountability, the bundles' story is still lacking. The supporting and inhibiting factors for bundles development planning and community participation in developing the bundle's management program in Tawangargo village are the inactive capacity of community resources, information problems, and institutions that have not been utilized optimally.

1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di ketahui bahwa BUMDes ialah usaha desa yang dibentuk atau di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Agar BUMDes dapat berfungsi sesuai peranannya maka perlu dilakukan pengembangan. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes di kelola secara terarah dan professional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes di harapkan dapat

mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Eksistensi BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada disetiap desa. Mampu mengelola potensi Desa dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Ada beberapa hal yang menarik pada semangat pembangunan desa setelah di sahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu UU ini menempatkan desa sebagai subyek pelaku pembangunan desa. Sekarang warga desa melalui struktur yang telah ada mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola pembangunan desanya dengan dana

yang sangat besar di tambah dengan asset dan potensi yang ada di desa dan sepenuhnya merumuskan langkahnya sendiri melalui musyawarah desa.

Situasi ini sangatlah berbeda saat UU desa belum di sahkan dimana pola pembangunan desa pada saat itu mengacu pada struktur yang di tentukan oleh pihak Kecamatan, Kabupaten, Ataupun Provinsi, Struktur Pemerintahan itu bisa saja melakukan intervensi kebijakan yang di buat di desa akibatnya pembangunan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ingin di capai (Mahkamah Konstitusi:2014). Menurut Eddy Yusuf (2016:3) dalam jurnalnya yang berjudul “pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)” mengatakan pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Nurcholis (2011:88) BUMDes diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Keberadaan BUMDes membutuhkan dukungan berupa semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Bumdes di atur dalam peraturan menteri desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa, untuk kesejahteraan

masyarakat desa dengan pengelolaan yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa (PERMEN,2015). BUMDes di bentuk oleh pemerintah desa, yang kemudian di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Ramadana:2013).

Dilansir dari website resmi pemerintah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang desa Tawangargo BUMDes yang ada di desa Tawangargo antara lain “Tanggo Mart” atau toko sembako yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Walaupun dengan adanya Tanggo Mart Orang-orang biasanya membeli kebutuhan pokok di tempat lain selama ini, yang membuat toko sembako ini tidak beroperasi sebagaimana mestinya dan menghasilkan dan membantu Desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian tentang kualitas atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa. Menurut Satori & Komariah (2014:22) Aspek yang paling signifikan dari fenomena makna dan arti di balik kejadian tersebut, yang dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi pengembangan konsep teoritis.

Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada subjek. Sumber data bersumber dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui penelitian terdahulu, jurnal, buku dan dokumen resmi berupa catatan penting dari kantoe desa yang relevan dalam tulisan ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa

Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

BUMDes didirikan di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Adanya BUMDes, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan, serta mampu menjadi pusat kebutuhan masyarakat desa dan menjadi tempat bagi desa lain untuk ikut berkembang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Mengembangkan ekonomi desa
- b. Mengembangkan penghasilan asli desa
- c. Mengembangkan potensi yang dimiliki desa berdasarkan keperluan masyarakat

- d. Menjadi penunjang peningkatan dan untuk meratakan ekonomi pedesaan.

Salah satu program kerja BUMDes Tawangargo adalah Unit Toko, dimana tujuannya salah satunya adalah sebagai penyalur Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).Unit Toko BUMDes Tawangargo juga memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat Desa Tawangargo.

Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan/laba yang di gunakan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan juga pendapatan asli Desa. Sedangkan target pasar Unit Toko BUMDes adalah anggota BUMDes dan juga masyarakat umum.

Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes Tawangargo

Dalam melaksanakan rencana kerja BUMDes Tawangargo Karangploso Kabupaten Malang, tentu saja memiliki factor pendukung dan factor penghambat. Hal ini dapat di jelaskan lebih lanjut dengan uraian sebagai berikut:

Faktor Pendukung

factor pendukung bagi BUMDes Tawangargo adalah dari pemerintah pusat melalui program pemberdayaan desa dan pengalokasian dana desa serta dari pemerintahan Desa melalui Musdes.

Faktor Penghambat

- a. Sinergitas masyarakat dengan pengelola BUMDes

Rencana kerja pembangunan BUMDes di desa Tawangargo memerlukan sinergitas antara masyarakat dengan pengelolanya. Ketiadaan sinergi antara masyarakat dan pengelola BUMDes akan menjadi satu kesulitan dalam mengimplementasikan rencana kerja dalam pembangunan BUMDes di Desa Tawangargo.

- b. Minim SDM Pengelola BUMDes
Minimnya SDM Pengelola BUMDes di Desa Tawangargo dapat memberi dampak

pada rencana kerja BUMDes. Karena akan menghambat rencana pengembangan unit usaha oleh BUMDes di desa Tawangargo.

masyarakat lainnya untuk aktif dalam membangun perekonomian di BUMDes tawangargo.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “ Sumber Rezeki” Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu dengan adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tawangargo kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di harapkan pemerintah desa dan masyarakatnya lebih aktif untuk mengikuti segala macam kegiatan, sosialisasi, dan pengelolaan lainnya agar BUMDes di Desa Tawangargo merasa lebih di pedulikan atau di perhatikan keberadaannya di Desa dan juga dapat membantu masyarakat yang ekonominya kurang mampu BUMDes bisa di gunakan dengan baik dan lebih efektif lagi.

5. SARAN

Berdasarkan hasil peneliian yang telah di lakukan dapat di berikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, pengelola BUMDes perlunya melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program kerja .
2. BUMDes yang di dilaksanakan oleh BUMDes Tawangargo, sehingga tidak kurangnya informasi antara masyarakat dan pemerintah desa.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat di harapkan memiliki keterbukaan terhadap adanya program kerja BUMDes. Masyarakat di harapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes Tawangargo. Masyarakat di harapkan tidak sibuk dengan pekerjaan sendiri atau pada bidang usaha yang di jalani, melainkan harus memotivasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokromidjojo. 2003. *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Edy Yusuf. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis. Volume 13, No 1.
- Handoko T. Hani, 2003. *Manajemen*, BAFE, Edisi II, Yogyakarta.
- Horton B. Paul dan Robert L. Horton, *introductory Sociology*, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982), 19.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurcholis, Hanif .2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Malang, Kabupaten Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa (c.2)*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Rahardjo dan Ludigdo. 2006. “*BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efesiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM)*”. Malang Fakultas Administrasi Publik.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam

Maria Natalia Lerabeni¹,

Universitas Putera Batam, Batam, Kepulauan Riau

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KATA KUNCI

Poverty, Crime and Society

KORESPONDENSI

E-mail:

marianatalialerabeni@gmail.com

A B S T R A C T

Poverty as One of the Causes of Crime. This article aims to analyze more deeply the effect of poverty on criminal acts that occur in the city of Batam. This study uses a qualitative descriptive method. Data obtained from secondary data, namely using literature studies, collecting information from various journals, and the latest news to be used as data sources. The results of the study show that the poverty line is increasing because the prices of necessities continue to soar, which has an impact on the difficulty of the community to survive. Criminal acts such as theft, mugging, robbery, and beheading are some crimes influenced by economic factors.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah global yang sulit untuk diatasi, kemiskinan terjadi diberbagai negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tentu mempunyai pekerjaan untuk memberantas kemiskinan, berbagai program pemerintah Indonesia dilakukan untuk memberantas kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pemerintah lakukan ialah menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan berupa BPJS dan

pemberian beasiswa pendidikan, memperluas kesempatan kerja, pembangunan pertanian dengan alat dan benih yang canggih, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi, memberikan bantuan program keluarga harapan dan sebagainya. Semua rangkaian cara dan program penanggulangan kemiskinan tersebut, berorientasi material, yang berarti keberlanjutan anggaran dan komitmen pemerintah. (Prawoto, 2009). Maka jika pemerintahan berganti program penanggulangan

juga bergantung pada peraturan pemerintahan yang baru..

Kemiskinan diartikan menjadi keadaan seseorang yang bekerja ataupun yang belum bekerja yang tidak sanggup mencukupi kehidupan dirinya ataupun keluarganya sendiri sesuai dengan biaya hidup di daerah.(Soekamto dalam Rusnani, 2015) Kemiskinan bermakna ketidakmampuan dalam mencapai tujuan, kemiskinan menggambarkan kondisi seseorang saat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.(Hakim, 2015) Banyak gambaran pendeskripsian tentang kemiskinan menurut para ahli, kemiskinan berdefinisi sebagai keadaan kehilangan sumber-sumber pemenuh kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta hidup serba kekurangan. (Jamaludin, 2015).

Berbagai teori kemiskinan yang muncul memiliki makna yang sama, salah satunya teori dari Bayo (Dalam Rahmalia et al., 2019) kemiskinan memiliki sifat multi dimensional yang berarti manusia memiliki bermacam kebutuhan, sehingga kemiskinan pun memiliki banyak perspektif atau sudut pandang. Dari perspektif kebijakan umum, kemiskinan merupakan aspek primer yaitu berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta ketrampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Bentuk kemiskinan ini berbentuk kekurangan gizi, air, kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan secara konseptual dirangkum sebagai suatu keadaan hidup yang selalu mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dalam konsep operasional ialah penetapan dengan tolok ukur garis kemiskinan. Dimana penduduk yang tidak mampu dalam segi ekonomi ditetapkan menjadi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan begitu berusaha mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut.(Hakim, 2015).

Kemiskinan terjadi karena ada faktor penyebabnya, tidak sulit menemukan faktor penyebab kemiskinan. Tetapi kesulitannya ialah menemukan penyebab utama atau yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kemiskinan. Kemiskinan semakin membesar disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, terdapat perbedaan pendapatan antar daerah, harga bahan pokok yang terus naik, biaya hidup yang berbeda antar daerah, kemampuan sumber daya manusia yang kurang maksimal dalam mengelola sumber daya alam dan juga korupsi yang merajalela. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan harus mempunyai data kemiskinan yang akurat dari Survei Badan Pusat Statistik yang bisa mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan (Taufiq et al., 2021).

Batam sebagai salah satu kota yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia merupakan satu dari berbagai kota yang

mengalami kemiskinan. Jika kita melihat salah satu faktor kemiskinan adalah faktor pendapatan, maka jika melihat upah minimum karyawan di Kota Batam yang mencapai angka Rp. 4.100.000 dan dibandingkan dengan kota lainnya maka dapat dikatakan itu upah yang cukup besar dan seharusnya dengan upah tersebut angka kemiskinan di Kota Batam akan berkurang.

Namun ada faktor lain yang harus diteliti terkait dengan masalah kemiskinan di Kota Batam. Pertama masyarakat kota Batam tidak semuanya bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja serabutan dengan penghasilan di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah Kota Batam. Sehingga tidak semua masyarakat Kota Batam merasakan UMK tersebut. Kedua, harga bahan pokok yang ikut melambung setiap terjadinya kenaikan UMK, menyebabkan biaya hidup yang terus meningkat sehingga kesempatan untuk menabung menjadi hilang karena harus mencukupi kebutuhan pokok ditambah lagi UMK yang diterima juga harus dipotong pajak penghasilan serta potongan asuransi karyawan. Ketiga, perantau yang terus berdatangan di Kota Batam tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta perantau yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya alam hanya akan menambah angka pengangguran dan secara tidak langsung menambah angka kemiskinan di Kota Batam. Keempat, terjadinya korupsi atas bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Tidak semua masyarakat mampu mencukupi kebutuhan ekonominya, sehingga ini dapat berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat kota Batam. Kebutuhan yang tidak tercukupi bisa mendorong terjadinya tindakan kriminalitas, melakukan segala cara walaupun melanggar norma yang berlaku untuk dapat mencukupi kebutuhan. Seperti melakukan pencurian, penjangbretan, perampokan, penipuan dan hal lainnya.

Tindakan kriminal kejahatan dasarnya timbul dari sifat manusia yang dilatarbelakangi oleh masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang kurang karena mendapatkan upah yang rendah yang tidak sebanding dengan kerja keras, sehingga berani melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan kepuasan atau pendapatan yang lebih besar. (Hardianto dalam Rahmalia et al., 2019).

Banyak penelitian dilakukan untuk mencari pengaruh kemiskinan terhadap tindakan kriminalitas. Salah satunya penelitian oleh Sugiarti Yayuk (2014) dengan judul Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. Hasil penelitiannya ialah kejahatan memiliki pengaruh yang positif dan relevan terhadap kemiskinan. Faktor terjadinya kejahatan karena kemiskinan ini mampu membuat seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan penganiayaan.

Berdasarkan fenomena kemiskinan ini dan dampak dari masalah kemiskinan, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih

dalam pengaruh kemiskinan terhadap tindakan kriminalitas yang terjadi di kota Batam.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif yang menggambarkan berbagai masalah dan menganalisis masalah tersebut menjadi lebih spesifik. Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kemiskinan mempengaruhi tindakan kriminalitas yang terjadi di kota Batam? Apakah pengaruh kemiskinan membawa dampak positif dalam penurunan kriminalitas atau membawa dampak negatif dalam peningkatan kriminalitas?

Selanjutnya ditentukan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian dengan wujud tulisan atau kata-kata tertulis, yang menyajikan data untuk dianalisis. Penelitian kualitatif ini harus berdasarkan teori yang sudah jelas, teori ini nantinya akan berperan untuk menjelaskan masalah yang penulis teliti, yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan hasil hipotesis dan juga bisa sebagai acuan untuk merangkai instrumen penelitian. Dalam mengumpulkan data untuk diteliti peneliti menggunakan studi pustaka, mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal dan berita terkini untuk kemudian dijadikan sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dikatakan miskin apabila tidak mampu mencukupi standar hidup minimal di suatu daerah. Kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum dan

hidup di bawah pendapatan minimum merupakan arti kemiskinan.

Survei yang dilakukan pemerintah menunjukkan data kemiskinan di Kota Batam mengalami perubahan setiap tahunnya. Tabel III.1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana garis kemiskinan dapat diartikan sebagai standar terendah biaya hidup di suatu daerah. Garis kemiskinan kian bertambah karena harga kebutuhan pokok yang terus melambung, disamping itu jumlah penduduk miskin juga bertambah dan berkurang yang terjadi karena jumlah penduduk yang juga bertambah dan berkurang. Terlihat pada tahun 2018 jumlah penduduk mengalami kenaikan yang disertai dengan jumlah penduduk miskin yang ikut naik, pada tahun 2019 terlihat data jumlah penduduk miskin berkurang disertai dengan jumlah penduduk kota Batam yang berkurang.

Tabel III.1. Garis Kemiskinan Kota Batam

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/ Kapital/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Jumlah Penduduk
2017	591 589	61,16	1.236.399
2018	650 406	67,41	1.329.773
2019	686 956	66,21	1.107.551
2020	707 856	67,06	1.196.396

Sumber: (BPS Kota Batam, 2021).

Data diatas memperlihatkan tingkat jumlah penduduk miskin yang tidak statis tetapi

fluktuatif, hal ini juga diiringi dengan jumlah penduduk Batam yang naik dan turun, maka dapat dikatakan terjadinya migrasi penduduk yaitu perpindahan penduduk. Sehingga perpindahan penduduk luar daerah untuk datang ke Batam dengan tujuan mencari pekerjaan hanya akan menambah angka kemiskinan. Terutama kepada para pendatang yang tidak mempunyai kemampuan, keterampilan dan kemauan bekerja keras yang hanya pasrah terhadap takdir hanya akan menambah jumlah penduduk miskin.

Kedatangan para perantau ini juga tidak diiringi dengan penambahan lapangan pekerjaan, sehingga persaingan antar masyarakat Batam dengan para pendatang untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Ditambah lagi banyak perusahaan di Batam yang telah gulung tikar makin menambah pengangguran di Batam. Maka berakibat pada angka kemiskinan yang akan terus meningkat.

Masalah kemiskinan berdampak pada sulitnya masyarakat untuk bertahan hidup, masyarakat yang masih berpikiran waras dengan akal yang sehat akan mengasah keterampilan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bertahan hidup. Dengan mengumpulkan sampah besi dan plastik untuk dijual ke pengepul. Namun berbeda dengan masyarakat yang sudah tidak memiliki akal sehat yang akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan yang mengancam keselamatan fisik dan psikis

seseorang demi mendapatkan keuntungan tindakan ini disebut kriminalitas. Kriminalitas merupakan masalah besar yang selalu ada dan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Kejahatan dapat di alami oleh seluruh lapisan masyarakat di Batam. Lingkungan masyarakat yang berbeda-beda memiliki pengaruh bagi seseorang dalam melakukan kejahatan. Adanya peluang di lingkungan yang penuh dengan keramaian dan kesibukan membuat tindakan kejahatan seperti pencurian mudah terjadi.

Kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh faktor dari luar individu dan dari dalam dirinya. Faktor dari dalam diri berupa emosi yang tidak terkontrol dengan baik, pendidikan moral yang kurang dari orang terdekat dan pendidikan sekolah yang tidak bisa dicapai karena alasan ekonomi menyebabkan wawasan dan bakatnya terkubur serta usia yang labil dan kepribadian yang tidak bisa terkontrol. Faktor dari luar yang mempengaruhi hadirnya tindak kejahatan ialah lingkungan sosial yang kurang benar sehingga membentuk pola perilaku yang tidak baik, ekonomi yang serba kekurangan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang membuat seseorang berani bertindak jahat, keluarga yang mengajarkan perilaku yang tidak baik, lapangan pekerjaan yang tidak kunjung tersedia membuat seseorang nekat bertindak jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan terakhir ada faktor terpengaruh film, film yang harusnya hanya dianggap sebagai hiburan malah dijadikan media pembelajaran untuk melakukan tindak kejahatan. (Prayetno, 2013).

Tabel III.2. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Kota Batam

Tahun	Jumlah Tindak Pidana
2018	2 473
2019	2 513
2020	2 263

Sumber: (BPS Kota Batam, 2021)

Kejahatan kriminal yang terjadi di Kota Batam terlihat mengalami penurunan. Namun apakah seluruh kejahatan kriminalitas tindak pidana ini terjadi karena pengaruh dari kemiskinan? Untuk itu maka peneliti memilih melakukan studi kasus acak terhadap beberapa peristiwa kriminalitas yang terjadi di Batam sepanjang tahun 2021.

Kasus kriminal pertama yaitu terjadinya pembunuhan pada 02 Februari 2021 yang terjadi karena masalah uang. Pembunuhan ini terjadi karena suami yang meminta uang pada istrinya untuk membeli sepatu baru yang akan digunakan untuk bekerja, namun korban yaitu istrinya sendiri menolak memberi uang karena untuk kebutuhan makan saja sulit. Sang suami yang bernama Supriadi ini akhirnya gelap mata dan mencekik leher istrinya, tidak berhenti sampai disitu ia memasukkan kepala istrinya ke dalam ember berisi air hingga akhirnya sang istri tewas.(Setiawan, 2021).

Kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan kriminal yang sering terjadi. Tribun Batam merilis kasus pencurian yang dilakukan oleh dua remaja berusia 15 dan 17 tahun, mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor pada bulan April 2021. Dua pemuda ini adalah pengangguran dan anak putus sekolah. Sehingga kasus pencurian

kendaraan bermotor ini dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup. (Silalahi, 2021)

Kasus perusakan barang orang lain untuk tindakan pencurian terjadi pada hari Kamis, 23 September 2021 yang dimuat dalam tribun Batam. Kejadian pembobolan mobil milik ketua Dewan Pendidikan Batam yang dirusak dan mengambil uang yang ada di dalam mobil sebesar 300 Juta. Namun sampai saat ini belum ditemukan siapa pelakunya dan masih dilakukan investigasi. Selanjutnya Kompas merilis berita Pembobolan yang dilakukan oleh karyawan di Supermarket tempat ia bekerja. Kasus ini terjadi 27 Oktober 2021, pelakunya adalah pekerja supermarket itu sendiri.(Maulana, 2021).

Kasus kriminal yang baru-baru ini terjadi di Batam yang termuat dalam Batamnews yaitu kasus pencurian yang disertai kekerasan yang sampai melukai korban yang terjadi di Ruko green mansion pada 14 Desember 2021. (Gusmeri, 2021). Diketahui faktanya pelaku pencurian bernama Tengku Saiful berusia 28 tahun ialah seorang kuli bangunan yang bekerja di daerah Green Mansion. Diperoleh hasil analisis bahwa pelaku demi memenuhi kebutuhan hidupnya berani melakukan tindakan kriminalitas.

Dari beberapa kasus tersebut menghasilkan fakta bahwa tindakan kriminalitas seperti pencurian, penjabretan, perampokan dan pembegalan adalah beberapa kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimana kebutuhan hidup yang tidak tercukupi menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan

yang merugikan orang lain demi kebutuhan hidupnya.

4. SIMPULAN

Kemiskinan yang terjadi tidak bisa terus dibiarkan harus dihadapi dan diatasi. Pemberantasan kemiskinan yang baik dapat terbentuk dengan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah yang telah memberikan berbagai bantuan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dalam memberikan bantuan pemerintah harus jujur dan adil. Penyebab terjadinya kemiskinan seperti pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya keterampilan dan beban tanggung jawab yang banyak. Jika tidak segera diatasi akan berdampak pada berbagai tindakan kejahatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Melakukan tindakan kriminalitas yang membahayakan orang lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Memperketat keamanan dan memberi peraturan yang tegas adalah salah satu cara untuk membuat para pelaku kriminalitas jera. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dengan masyarakat yang secara sigap melaporkan tindakan kriminal yang terjadi serta pihak berwajib yang dengan cepat memproses dan menindak para perilaku kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Batam. (2021). *Kota Batam Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Batam.

Gusmeri, E. (2021). Mencuri di Ruko Green Mansion Batam, Pelaku Lukai Pemilik

Rumah. *Batamnews*, 3. <https://batam.suara.com/read/2021/12/15/174953/mencuri-di-ruko-green-mansion-batam-pelaku-lukai-pemilik-rumah>

- Hakim, I. F. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. *Sosiologi Perkotaan*, 2(2), 59–80.
- Maulana, H. (2021, October). Pembobol Supermarket di Batam Ternyata Karyawan Sendiri, Usai Mencuri Masuk Kerja Jadi Kasir. *Kompas.Com*, 1. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/200836978/pembobol-supermarket-di-batam-ternyata-karyawan-sendiri-usai-mencuri-masuk?page=all>
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Prayetno. (2013). Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 12, 30–45.
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Kajian Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Fakultas Ekonomi*, 1(3), 21–36.
- Rusnani. (2015). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE “Jurnal Bisnis & Akuntansi”*, 5(1), 42–59. <https://doi.org/10.24929/feb.v5i1.128>
- Setiawan, E. (2021). Pembunuhan Sadis di Batam, Pelaku Cekik Istri dan Benamkan Kepala Korban ke Ember Hingga Tewas. *Tribun Batam*, 3. <https://batam.tribunnews.com/2021/02/02/pembunuhan-sadis-di-batam-pelaku-cekik-istri-dan-benamkan-kepala-korban-ke-ember-hingga-tewas>
- Silalahi, I. A. (2021, April). 2 ABG Curi Motor Saat Malam Ramadhan Tak Berkutik Diringkus Polisi di Pantai Stres Batam. *Tribun Batam*, 2. <https://batam.tribunnews.com/2021/04/25/2-abg-curi-motor-saat-malam-ramadhan->

tak-berkutik-diringkus-polisi-di-pantai-
stres-batam

Taufiq, N., Pratiwi, E. W., Fatmawati, A. D., Retnosari, L., & Santi, N. D. (2021). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2021* (N. Sahrizal, N. Taufiq, & Mastufah (eds.)). Badan Pusat Statistik.

Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu

Asih Widi Lestari¹ Fransiska Novian² Noora Fithriana³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KEYWORDS

Administration, Service Quality, Public Service

KORESPONDENSI

No HP: 0823-0010-6243

E-mail: lestariwidi263@gmail.com

ABSTRACT

The government's main task is to provide public services to service recipients. Public services are service providers by the government, both private and public, using financing or free use to meet the needs or interests of the community. The purpose of this study was to determine the Quality of Service in Making Identity Cards (KTP) at the Population and Civil Registration Office of Batu City, as well as to determine the supporting and inhibiting factors of Service Quality in Making Identity Cards (KTP) at the Population and Civil Registration Office of Batu City. The type of research used is qualitative research. Source of data obtained from primary and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The informant's technique is Snowball sampling using a key informant who is the Head of the Population Identity Section at the Population and Civil Registration Office of Batu City. The data analysis technique uses reduction, presentation, and conclusion drawing. The validity of the data used is technical triangulation. The results of the study find out that the quality of service in making identity cards (KTP) can be said to be good in terms of dimensions, meaning that the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy are by service standards. Thus, those who support the service of making Identity Cards at the Population and Civil Registration Office of Batu City are from the dimensions of Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy because of the availability of adequate facilities such as the presence of mobile cars, ball pick-ups, and PKK Peak to facilitate the community in managing population documents and the service process provided quickly and quickly as well as the courtesy of employees. The sign of the obstacle is the Tangible dimension because there are still several problems in making Identity Cards, such as the network that often occurs in errors, the unavailability of special waiting room facilities for the disabled and the elderly, and the lack of identity cards.

1. PENDAHULUAN

Kualitas ialah hal yang bermakna bagi perkembangan pelayanan. Pada masa kini orang mulai menggunakan kualitas sebagai tolak ukur dalam melakukan pelayanan. sehingga saat ini kualitas ialah suatu strategi yang digunakan untuk mengetahui bagaimana melayani pengguna layanan, sehingga terlihat bahwa kualitas ialah faktor penting dalam pelayanan. Tiap pemerintahan dalam suatu daerah

sebaiknya melayani dengan baik setiap kebutuhan pengguna layanan. Ada juga yang diartikan pelayanan disini ialah pelayanan yang termasuk dalam kepuasan masyarakat, Guna memberikan kepuasan pelayanan pada penerima layanan publik dan telah disumbangkan institusi, butuh terdapatnya fasilitas dan prasarana yg menunjang.

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah terus semaksimal mungkin untuk tingkatan kualitas pemberian pelayanan kepada penerima

layanan baik pelayanan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ini sebagai hal wajib untuk diimplementasikan, sebab institusi ialah orang yang sangat penting dalam penyelenggaraan kepentingan publik untuk masyarakat. Agar bisa mencapai sasaran tersebut hingga kualitas pelayanan yang cocok dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat wajib jadi tujuan pemerintah.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti di Dispendukcapil KotaBatu menggambarkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada Pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah dapat dikatakan berkualitas, akan tetapi masih terdapat faktor penghambat yang harus lebih ditingkatkan serta diperbaiki lagi yaitu di dimensi tangible supaya kedepannya pelayanan yang diberikan pada masyarakat akan jauh lebih baikberdasarkan SOP.

2. METODE

Dalam melakukan riset peneliti menggunakan metode observasi langsung serta wawancara lapangan dengan deskriptif. Riset ini dilakukan dengan survei langsung di Kantor Kecamatan Batu Kota Batu, sebagai salah satu sampel dalam penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian tersebut yakni:

Bentuk riset : deskriptif dengan pendekatan jenis kualitatif

Lokasi penelitian : Dispendukcapil Kota Batu

Fokus penelitian : Kualitas Pelayanan

Sumber data : Data Primer dan Data Sekunder

Teknik pengambilan data : Snowball sampling

3. HASIL PENELITIAN

Kualitas Pelayanan publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batu Instansi pemerintahan dalam pemberian

pelayanan pada masyarakat yg wajib diperhatikan ialah kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ketika melakukan pelayanan yang diberikan para pegawai. Dalam hal ini, saat memberikan pelayanan kepada penerima layanan faktor prasarana, kualitas sumber daya manusia serta akuntabilitas para aparat pemerintahan ialah hal yang paling utama pada pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.Kualitas pelayanan akan mampu dihasilkan bila pelayanan yang diberikan memenuhi peraturan serta persyaratan yg sudah ditentukan sebelumnya.

Untuk menganalisis kualitas pelayanan publik, memakai teori dari Zeithaml et al (pada hardiansyah, 2011: 48).

1. Bukti Fisik (Tangible)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang masih bermaslah yaitu: kenyamanan tempat atau fasilitas pelayanan serta kedisiplinan pegawai di Dispendukcapil Kota Batu. Dalam memberikan pelayanan di Dispendukcapil telah menerapakan tangible bersamaan yang mempengaruhi dalam melakukan pelayanan . Untuk menilai kualitas pelayanan publik pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk belum berjalan sesuai dengan kualitas pelayanan karena, dalam dimensi ini yang masih bermasalah antara lain: jaringan yang terdapat dipusat pusat serta pernah mengalami kekurangan blangko Kartu tanda Penduduk dan untuk kedisiplinan pegawai sendiri sudah bisa dikatakan baik sebab telah sesuai dengan waktu pelayanan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan juga masih ada pula kekurangan pada dimensi tangible yang berkaitan dengan sarana dan prasaranan seperti pada loket pelayanan yang wajib di perbaiki.

2.Keandalan (Reliability)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dimensi reliabilityditetapkan beberapa indikator yang didalamnya yaitu: kecermatan pegawai dalam pelayanan Kartu

Tanda Penduduk dan standar pelayanan yang baik. Dengan demikian untuk menilai kualitas pelayanan publik sudah dapat dikatakan berkualitas karena pegawai sangat profesional dan teliti dalam melayani masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk, kendati demikian terkadang masyarakat yang salah dalam menuliskan identitas pribadi sehingga pegawai harus melakukan pengecekan ulang data sebelum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dan standar pelayanan di Dispendukcapil Kota Batu sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya dalam dimensi reliability, pada pemberian pelayanan kepada penerima layanan telah baik dan sesuai dengan keahlian di bidangnya pegawai yang ditunjang juga dengan dengan kemampuan kerja dan pendidikan yang sesuai.

3. Ketanggapan (responsiveness)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk Pelayanan publik Dispendukcapil sudah menerapkan dimensi responsiveness beserta indikator yang ada. Dalam hal ini untuk penilaian kualitas pelayanan sudah dapat dikatakan berkualitas karena antara lain mengenai respon yang diberikan oleh pegawai dalam melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan ketepatan dan kecepatan waktu yang diberikan dalam melayani masyarakat.

Hal ini perlu diperhatikan agar lebih memberikan lagi kinerjanya agar masyarakat juga semakin nyaman dalam melakukan pelayanan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mengenai responsiveness, sudah dapat dikatakan berkualitas karena pegawai sangat cepat merespon kebutuhan masyarakat dalam pelayanan itu sendiri.

4. Jaminan (Assurance)

Pada wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ditemukan, bahwa telah melaksanakan dimensi Assurance

dalam melayani masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dinilai bahwa sudah dapat dikatakan berkualitas yaitu dalam hal jaminan biaya pelayanannya, sedangkan pada jaminan waktu sendiri juga sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi pegawai harus lebih menginformasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui ketika melakukan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk itu sendiri. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mengenai assurance, dalam melayani sudah tepat waktu.

5. Empati (Empathy)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, pada dimensi empathy sudah dapat dikatakan berkualitas karena pegawai berlaku adil tanpa melihat status sosial dari masyarakat itu sendiri dan sopan dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat ketika melakukan pelayanan akan merasakan nyaman. Sedangkan pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan empathy, sudah dapat dikatakan berkualitas yang dilihat dari tata bahasa yang ramah dan penampilan yang sopan pegawai, sehingga yang dilayani merasakan nyaman dengan pelayanan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Di analisis dari penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Yudha dan Firdausi (2019).

a) Hambatan

Jaringan pada pusat yang ada yang terkadang error. Belum tersedianya fasilitas ruang tunggu untuk ibu menyusui, difabel juga lansia sehingga ketika ada ibu yang membawa bayi mereka harus keluar untuk menyusui anaknya.

b) Pendukung

Terdapatnya fasilitas pendukung seperti PKK Penak, jemput bola dan fasilitas mobling. Kecepatan dalam melayani. Tersedianya SDM memadai. Pelayanan yang telah sama dengan SOP dan peraturan.

4. SIMPULAN

Pada uraian hasil dan pembahasan diatas, sehingga peneliti menyimpulkan Kualitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk sudah dapat dikatakan baik, karenadi lihat pada dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphatysesuai dengan standar melayani yang ada. Sedangkan faktor penghambat yaitu dari Dimensi tangible antara lain Jaringan dari pusat yang terkadang bermasalah atau error. Belum adanya fasilitas ruangan tunggu khusus ibu menyusui. Bekurangan blanko.

Untuk faktor pendukung pelayanan dari dimensi reliability, responsiveness, assurance dan emphaty seperti tersedianya sumber daya manusia yang memadai, fasilitas yang memadai juga seperti adanya mobil keliling, jemput bola dan PKK Penak untuk mempermudah pengguna layanan dalam membuat dokumen dan proses melayani kebutuhan masyarakat sudah cepat serta keramahan dan sopan santun pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Fithriana, N. And Silmia, S., 2020. Inovasi Layanan Cetak Tiket Mandiri Untuk Menunjang Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 2 (1), PP. 19-30, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Hardiyansyah, H. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.

Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.

Irfadat Taufik. 2021. *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Surabaya. Cv Jakad Media Publishing.

Kahar, 2019. *Kualitas Pelayanan e-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan*. Ejournal

KAWASA, 9(1), PP. 10-19, diakses pada tanggal 15 Desember 2021..

Moleong Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
Ndia, V. And Sasmito, C., 2019.

Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Program 3 In 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu). *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8 (2), PP. 48-54, diakses pada tanggal 08 Oktober 2021.

Yudha, F. And Firdausi, F., 2019. *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia)*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6 (2), PP. 75-79, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.

Undang-undang pasal 1 Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik.

Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep Blue Economy Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang

Helmi Pratama Firmansyah¹ Sri Rahayu²

International Program of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta¹
Universitas Maritim Raja Ali Haji²

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KEYWORDS

Blue Economy, Management, Mangroves

KORESPONDENSI

E-mail:

pfhelmi@gmail.com, sriahayu@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this study is an effort to apply the blue economy concept to optimize the potential of mangrove resources in improving the economy of coastal communities in the District of Back Padang. This research is motivated by the problem of misunderstanding for the community in utilizing the existing potential so that there is no looting of mangrove forests. The theory used in this discussion refers to the concept of the blue economy because it is oriented to the principle of strength and potential in the region as well as empowerment in strengthening the economy of coastal communities, this study also uses qualitative methods with descriptive research types. The results of this study indicate that the existence of the blue economy concept is able to answer in increasing knowledge and empowerment of coastal communities that the potential in mangrove forests can be processed into processed products such as syrup and crackers. In addition, it can create a central area for aquatic biotic cultivation, which can encourage the wheels of the economy for communities in coastal areas. The development of coastal areas must depart from its ecological and economic functions and the concept of Blue economy is a model in the field of economic strategy that is implemented in coastal areas.

1. PENDAHULUAN

Salah satu nawacita Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo adalah pembangunan wilayah dalam konsep pembangunan kemaritiman. Salah satu strategi untuk menjaga lingkungan adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Salah satu negara yang mendukung gagasan pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah Indonesia, yaitu dalam bentuk ekonomi biru. Indonesia merupakan negara kelautan dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, sehingga penggunaan konsep ekonomi biru menjadi lebih efektif (Prayuda, Sary and Riau, 2019).

Eksplorasi sumber daya alam ini sudah melampaui kapasitas atau daya dukungnya karena konsep ekonomi biru sangat tepat dan praktis untuk dijadikan landasan bagi para pengelola sektor kelautan dan perikanan

yang saat ini kita akui masih belum optimal dan cenderung menjadi eksploitatif. kapasitas.

Sudah saatnya Indonesia, negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, mencapai kemandirian dengan memanfaatkan wilayah laut sebaik-baiknya dengan tetap mempertimbangkan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial yang khas di wilayah tersebut dan mengelolanya secara berkelanjutan. (Thoriq Maulana *et al.*, 2015). Ekosistem mangrove sering disebutkan seperti hutan mangrove atau hutan payau. Jenis hutan tropis yang disebut habitat mangrove sering tumbuh di samping atau dekat muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Ekosistem mangrove banyak dijumpai di daerah pesisir yang terlindung dari gelombang (Huda, 2008). Menurut Hutchings dan Saenger (1987) Daerah tropis dan subtropis memiliki pantai-

pantai terlindung di mana mangrove tumbuh subur, yang merupakan ciri khas perkembangan tumbuhan pesisir (ADLN, 2005). Peta sebaran mangrove di Pulau Batam yang dibuat dengan menggunakan citra Landsat 8 dapat digunakan sebagai sumber data mengenai sebaran mangrove di Pulau Batam. Sagulung merupakan kecamatan dengan kawasan mangrove terluas. Kecamatan Sagulung memiliki luas mangrove terluas (7.189.779,33 m²), sedangkan Kecamatan Batu Ampar memiliki luas paling sedikit (170.814,86 m²) dan Kecamatan Lubuk Baja tidak memiliki mangrove sama sekali. Kelas kerapatan jarang mendominasi mangrove di Pulau Batam, dengan kisaran nilai NDVI - 0,09 hingga -0,01 (Irawan and Malau, 2016). (Sumber: Olahan Penelitian Terdahulu)



Gambar 1. Peta Persebaran Mangrove Di Kota Batam



Gambar 2. Contoh Tempat Rekreasi Mangrove di Kota Batam

Menurut informasi luasan hutan mangrove di Kecamatan Belakang Padang selama delapan tahun terakhir telah menyusut

sebesar 28,55% (1.258,60 ha), yang menyebabkan tambahan pembangunan (perumahan dan tambak udang) (Sumber: Nahib,2009).

Potensi kerusakan hutan bakau sangat tinggi terutama karena pembukaan dan penjarahan hutan bakau itu sendiri, terutama di daerah-daerah yang perkembangan industrinya sangat pesat, seperti yang terjadi di Kota Batam yang hanya 40% dari bakau yang masih ada (Sumber: BKIPM RI). Akibat penimbunan dan penjarahan hutan mangrove, hanya tersisa tempat wisata di sepanjang garis pantai Pulau Batam. Biota dan habitat di pulau-pulau yang masih memiliki hutan mangrove harus dilindungi. Mangrove dapat berfungsi sebagai penahan erosi sekaligus sebagai lokasi pengolahan komoditas, kandang ternak, dan wisatawan.



Gambar 3. Sirup, Dodol, Selai dari buah pidada

Sumber: BPHM Wilayah I, 2007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah mangrove dari Desa Wanasari layak untuk diolah dan tidak tercemar limbah karena buah yang akan digunakan merupakan buah matang pada pohonnya. Anggota Pokhlasar Wanasari diajari apa saja yang dikuasai Kadek. Di Desa Kepiting Wanasari, produk olahan buah mangrove ini ditawarkan untuk dijual. Mangrove tidak boleh dieksploitasi atau ditebang, dan hanya buah matang dari pohon yang boleh dikonsumsi. Orang bisa berargumen bahwa hanya buah bakau dan air nipah tumbuhan nipah yang digunakan. Organisasi Pokhlasar Wanalestari terus mendukung bagian dari kelestarian dan konservasi hutan mangrove (Farhaeni, 2016)

Tabel 1. Prinsip Ekonomi pada Usaha Pengolahan Ikan di Masyarakat Pesisir Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Aturan Ekonomi Biru	Prinsip Ekonomi Biru dalam Praktek
Minimalkan limbah	Ada lima toko fillet di Kluwuk, di mana lima ton tulang dan kulit ikan diproduksi setiap minggunya.
Efek pengganda	Pengelolaan usaha kerupuk kulit dan penghancur tulang mampu mendongkrak pendapatan bulanan hingga Rp. 600.000
Keterlibatan sosial	Dibutuhkan 1-2 orang untuk bekerja di industri pengolahan kulit dan tulang.
Inovasi dan adaptasi	I Memanfaatkan sisa-sisa kulit dan tulang untuk membuat produk makanan adalah sebuah inovasi. Premis di balik inisiatif ini adalah bahwa banyak tulang dan kulit dibuang tetapi tidak pernah digunakan.

Sumber: Olahan Data Primer Penelitian Terdahulu

Salah satu masyarakat pesisir yang telah mengadopsi pendekatan ekonomi biru adalah Kabupaten Brebes di Jawa Tengah, seperti terlihat pada tabel di atas. pengolahan tulang ikan menjadi abon ikan dan kulit ikan menjadi kerupuk ikan adalah salah satu contoh dari ide ekonomi biru yang sedang dijalankan. Dengan mengolah tulang dan kulit ikan menjadi barang olahan, proses pengolahan kulit mampu menerapkan prinsip minimisasi limbah.

Barang olahan memiliki efek pengganda dengan memberikan pendapatan tambahan dan sumber dukungan yang berbeda. Prinsip inklusi sosial diterapkan dalam pengolahan kulit dan tulang ikan karena semua masyarakat pesisir dapat berpartisipasi dalam prosesnya karena tidak membutuhkan banyak uang. Pemanfaatan sampah sesuai prinsip inovasi dan adaptasi.

Untuk itu adanya konsep *blue economy* untuk merubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pemanfaatan potensi yang ada pada mangrove tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Siapa saja Pihak yang Terlibat Dalam Eksploitasi Sumber Daya Mangrove dan Bagaimana cara mengoptimalkan Sumber Daya Mangrove Berbasis *Blue Economy* Bagi Masyarakat Kecamatan Belakang Padang Kota Batam?

2. METODE

Blue Economy

Blue Economy yaitu konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Industri ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil, menjaga daya dukung dan standar lingkungan pesisir dan laut. Ide Ekonomi Biru secara efektif memanfaatkan sumber daya alam tanpa limbah sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. sistem produksi yang ramah lingkungan, berkelanjutan lingkungan, inovatif, dan telah mengadopsi teknologi hijau.

The Long-Term Benefits of Sustainable Marine Resource Use for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries, The Potential of the Blue (Pauli, 2018).

Gunter Pauli menerbitkan bukunya *The Blue Economy* pada 2010 dan menggunakannya untuk mengajukan gagasan "Ekonomi Biru." Salah satu aspek transisi dari ekonomi terestrial ke ekonomi maritim yang mempesona orang adalah gagasan bahwa ekonomi hijau dapat diimplementasikan sendiri tanpa dukungan ekonomi biru. Apalagi mengingat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah tetap memegang teguh filosofi ekonomi biru dalam semua rencana pembangunan (Mira, Firdaus and Reswat, 2014).

Pengelolaan

Pengelolaan adalah upaya sistematis dan menyeluruh yang dilakukan untuk fungsi lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan,

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 yang memuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (2).

Manajemen merupakan ungkapan yang digunakan dalam ilmu manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2003:119). Kata manajemen secara etimologis berhubungan dengan kata kerja manage (mengelola), dan biasanya merujuk pada tata cara atau penanganan tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, manajemen merupakan salah satu cabang ilmu manajemen yang mengkaji tentang bagaimana mengendalikan dan menangani suatu hal guna mencapai tujuan tertentu (D. Alita, S. Priyanta, 2014)

Manajemen adalah proses pengorganisasian tugas yang akan dilakukan oleh fungsi manajemen, yang jelas membantu dalam menentukan format tujuan yang disepakati bersama (Dr. Hj. Fory A. Naway, 2016).

Mangrove

Tidak diketahui secara pasti dari mana kata "mangrove" berasal. Menurut yang lain, kata itu mungkin merupakan gabungan dari bahasa Portugis dan Inggris. Ketika istilah "mangue" (istilah Portugis untuk satu jenis pohon bakau) dan "rumpun" (padanan bahasa Inggris) digabungkan, "mangrove" atau "mangrove" hasilnya. Mangrove adalah tumbuhan pohon atau komunitas tumbuhan yang ada di zona pasang surut antara laut dan darat (Dr. Hj. Fory A. Naway, 2016).

Hutan mangrove, yang biasanya terdapat di lumpur, pasir, atau lumpur berpasir, adalah hutan yang selalu atau sering diatur oleh air laut dan tunduk pada pasang surut. Mangrove adalah bentuk vegetasi yang khas di wilayah pesisir; tingginya bisa mencapai 50–60 meter dan floranya memiliki kebiasaan pohon-pohon besar.

Ekosistem mangrove merupakan kumpulan makhluk hidup (tumbuhan dan hewan) yang hidup berdampingan dalam suatu habitat mangrove. Karena mereka menggabungkan lingkungan darat dan perairan, mangrove merupakan jenis ekosistem yang khusus. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam

kehidupan masyarakat dimana mereka berada, terutama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti kayu dan biota air (ikan, udang, dan kepiting), yang biasanya tidak ditemukan di hutan jenis lain (Thew *et al.*, 2015)

Metode Penelitian

Karena penelitian ini akan menggambarkan atau mengkarakterisasi gejala yang sesuai dengan kondisi saat ini, maka pendekatan deskriptif kualitatif diadopsi ditengah-tengah masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mangrove di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan isu-isu yang dikaji yakni Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep *Blue Economy* Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang

3. HASIL PENELITIAN

Pihak yang Terkait Dalam Eksploitasi Sumber Daya Mangrove

Menurut Sri Puryono, pengelolaan akademik dan teknis Sumber daya alam hutan bakau, pariwisata, dan metode pertanian bakau semuanya berdampak besar pada bagaimana tempat-tempat itu tumbuh. Namun, lembaga dan peraturan memiliki dampak kecil terhadap konservasi (Soedarmo, 2018). Pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya mangrove sebagai berikut:

1. *Stock Holder*, khususnya organisasi masyarakat yang bungkam dengan mendasarkan eksistensinya pada kekayaan alam yang terdapat di sepanjang pantai
2. *Share Holder* yang juga pemegang saham dalam budidaya dan operasi perikanan pesisir lainnya.
3. *Stake Holder*, atau masyarakat umum yang berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya alam dan hasil usaha di wilayah pesisir, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lain di luar wilayah pesisir.

Bagaimana mengoptimalkan Sumber Daya Mangrove Berbasis Blue Economy Bagi Masyarakat Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

Potensi di wilayah ini memiliki efek yang menguntungkan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan menunjukkan bagaimana sumber daya pesisir digunakan dalam banyak masalah, seperti yang mempengaruhi daya tarik pesisir dan produksi ikan. Upaya pengelolaan sumber daya mangrove dengan prinsip efisiensi sumber daya, *zero waste*, tanggung jawab sosial, sistem siklus produksi, inovasi dan adaptasi, serta kelembagaan yang berkelanjutan dikenal dengan manajemen ekonomi biru.

Berikut ini adalah beberapa taktik yang dapat digunakan untuk mengelola sumberdaya mangrove berbasis ekonomi biru:

1. Meningkatkan industri berbasis potensi sumberdaya mangrove di lokasi pesisir. Strategi pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pertumbuhan ekonomi makro masyarakat, yang akan mendorong perekonomian lokal tanpa mengubah status masyarakat sebagai subjek pembangunan dan bukan sebagai objek.
2. Meningkatkan infrastruktur sesuai dengan tujuan UMKM untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dan sumber daya mangrove, yang menawarkan beberapa keuntungan bagi masyarakat setempat.
3. Memulihkan, menjaga, dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem, produktivitas, ketahanan, fungsi laut, dan nilai yang melekat pada ekosistem.
4. Selain itu, adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya mangrove untuk dibudidayakan potensinya ataupun dijadikan ekowisata.

Bagaimana status ekologi dan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan hutan mangrove?

1. Tujuan kebijakan pemerintah daerah adalah untuk mengetahui bahwa berbagai tindakan dan tindakan praktis dapat membantu hutan bakau memberikan dampak positif pada kekayaan dan kesejahteraan lingkungan.
2. Masyarakat harus memiliki akses penyuluhan tentang penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah daerah tentang hutan mangrove untuk menghilangkan mitos bahwa keberadaan tanaman mangrove hanya berfungsi untuk menghambat produktivitas tambak mereka atau terlibat dalam penjarahan luas hutan mangrove.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap mangrove menawarkan bantuan dan dukungan.

Simpulan

Hadirnya konsep *blue economy* ini tentu berdampak positif bagi masyarakat wilayah pesisir terutama pada Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Inisiatif utama untuk meningkatkan posisi ekonomi wilayah pesisir adalah ekonomi biru. Konsep ekonomi biru sudah ada, dan diragukan manfaatnya bagi warga pesisir, khususnya di Kecamatan Belakang Padang di Kota Batam.

Inisiatif utama untuk meningkatkan posisi ekonomi wilayah pesisir adalah ekonomi biru. Ekonomi biru, yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan lebih banyak barang dan nilai sekaligus menangani masalah sosial, dapat menjadi model bagi pertumbuhan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Asia. negara-negara Pasifik.

Gagasan ekonomi tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai pemanfaatan mangrove bagi lingkungan dengan menciptakan usaha berbasis potensi sumberdaya mangrove di wilayah pesisir. Strategi pemberdayaan masyarakat berpusat pada pembangunan ekonomi makro bagi masyarakat, yang akan meningkatkan perekonomiannya dengan tetap menjadikannya sebagai subjek pembangunan, bukan objek

DAFTAR PUSTAKA

- D. Alita, S. Priyanta, And N. R. 2019 (2014) ‘Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat’, *Journal Of Chemical Information*, 53(9), Pp. 1689–1699.
- Dr. Hj. Fory A. Naway, M. P. (2016) *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*.
- Farhaeni, M. (2016) ‘Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali’, *Jurnal Studi Kultural*, I(1), Pp. 21–27.
- Hilman, Hakim Muhammad (2014) ‘Pengaruh Kultural Sekolah Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan’, *Universitas Pendidikan Indonesia*, Pp. 36–54.
- Huda, N. (2008) ‘Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi’, *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*. Available At: [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/18579/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/18579/).
- Irawan, S. And Malau, A. O. (2016) ‘Analisis Persebaran Mangrove Di Pulau Batam Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh’, *Jurnal Integrasi*, 8(2), Pp. 80–87.
- Mira, Firdaus, M. And Reswat, E. (2014) ‘Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir’, *Buletin Riset Sosek Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), Pp. 17–23.
- Nahib, I. (No Date) ‘Analisis Ekonomi Keterkaitan Perubahan Hutan Mangrove Dan Udang Di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
- Prayuda, R., Sary, D. V. And Riau, U. I. (2019) ‘Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi Asean A’ *Indonesian Journal Of International Relations*, 3(2), Pp. 46–64.
- Situmorang, C. P. (2019) ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pantai Labu.
- Soedarmo, S. P. K. (2018) *Pelestarian Hutan Mangrove Dan Peran Serta Masyarakat Pesisir*.
- Utun_Mangrove_Dan_Peran_Serta_Masyarakat_Pesisir.Pdf. Tamura, H. (2018) ‘Bab Iii Kuantitatif Pendekatan Korelasional’, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), P. 287.
- Thew, R. *Et Al.* (2015) ‘I Identifikasi Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Penunjang Ekowisata Di Pulau Tanakeke, Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar’, *Metrologia*, 53(5), Pp. 1–116. Available At: [Http://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugue](http://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugue)

Thoriq Maulana, M. *Et Al.* (2015) 'Laporan Akhir Laporan Akhir (201310200311137), Pp. 78–79. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik

.